MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026

PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Erina Maheo Rahmaistiazah[1], Nasrullah Dali[2], Nur Asni[3]
[1,2,3]Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo
Email: Erinamaheorahmaistiazah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif* dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 117 responden menggunakan *teknik sampling jenuh*. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan *nilai signifikansi* 0,001 < 0,05 serta koefisien regresi yang bernilai positif, yang menunjukkan adanya hubungan searah antara kedua variabel. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang dihasilkan. Kesimpulan penelitian ini bahwa penerapan teknologi informasi memiliki peran dalam mendukung transparansi, ketepatan waktu, dan keandalan informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi serta kompetensi sumber daya manusia perlu terus dilakukan guna mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Regresi Linear Sederhana, Teknologi Informasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Information Technology on Financial Management Accountability at the Regional Financial and Asset Management Agency of Southeast Sulawesi Province. This research employs a quantitative approach using a survey method. Data were collected through the distribution of questionnaires, with a sample of 117 respondents selected using a saturated sampling technique. The data obtained were analyzed using simple linear regression analysis. The results indicate that Information Technology has a significant effect on Financial Management Accountability. This is evidenced by a significance value of 0.001 < 0.05 and a positive regression coefficient, demonstrating a unidirectional relationship between the two variables. These findings suggest that the more optimal the utilization of information technology in regional financial management processes, the higher the level of accountability achieved. The study concludes that the implementation of information technology plays an important role in supporting transparency, timeliness, and reliability of regional financial information. Therefore, improving the quality of technological infrastructure and human resource competencies is essential to optimize financial management accountability in a sustainable manner.

***Keywords**: Accountability, Financial Management, Simple Linear Regression, Information Technology.*

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Indonesia menerapkan sistem desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk keuangan daerah. Kewenangan tersebut menempatkan akuntabilitas sebagai elemen fundamental dalam pengelolaan keuangan publik karena pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana transfer pusat, maupun pendapatan asli daerah digunakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Ayem & Amahala, 2023). Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan keuangan menjadi prasyarat penting dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah yang berkelanjutan.

Dalam perspektif administrasi publik, penerapan *good governance* merupakan landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, supremasi hukum, dan keadilan harus terintegrasi dalam setiap proses pengelolaan sumber daya publik agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral kepada masyarakat (Tanaamah et al., 2021). Khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, *good governance* berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Akuntabilitas menjadi salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan, terutama pada era desentralisasi fiskal yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penggunaan dana publik. Akuntabilitas tidak lagi dimaknai sebatas kewajiban administratif dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran secara jujur, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Tingkat akuntabilitas yang tinggi berperan strategis dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan (Rahma et al., 2024).

Namun, upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan kompleksitas proses administrasi keuangan yang meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tanpa dukungan sistem yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik, risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data, serta potensi penyimpangan dapat meningkat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas laporan keuangan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan temuan audit serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Norcahyani, 2022).

Perkembangan teknologi informasi menghadirkan peluang strategis dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. Pemanfaatan teknologi memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan sistematis, sekaligus mendukung pengawasan berbasis data. Implementasi sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang kemudian bertransformasi menjadi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong transparansi dan modernisasi administrasi keuangan (Syachbrani, 2024).

Transformasi dari SIMDA ke SIPD merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam membangun integrasi data keuangan secara nasional. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD ditetapkan sebagai platform tunggal berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pengelolaan

aset daerah dalam satu ekosistem digital. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan, memperkuat pengawasan, serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan anggaran (Kementerian Dalam Negeri, 2019; Suryani & Firmansyah, 2021).

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi berkontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Fitriah (2025) menemukan bahwa sistem informasi keuangan daerah mampu meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Suharyanto (2020) juga menyatakan bahwa penggunaan SIMDA meningkatkan efektivitas penyusunan laporan keuangan serta menurunkan risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, Lestari dan Widodo (2021) membuktikan bahwa teknologi informasi yang terintegrasi berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan internal dan percepatan proses audit.

Meskipun demikian, hubungan antara teknologi informasi dan akuntabilitas tidak selalu bersifat linear. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi sangat bergantung pada kesiapan organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur. Sriwijayanti (2021) menegaskan bahwa teknologi informasi tidak secara otomatis meningkatkan akuntabilitas tanpa adanya komitmen organisasi dan kapasitas SDM yang memadai. Ghinaldi (2024) juga mengungkapkan bahwa kendala teknis seperti keterbatasan jaringan, kesalahan sistem, serta minimnya pelatihan dapat menghambat efektivitas penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara praktis, penerapan teknologi informasi telah meningkatkan kualitas tata kelola di berbagai daerah melalui integrasi data, percepatan proses administrasi, dan peningkatan akurasi pelaporan. Namun, keberhasilan tersebut belum merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Meskipun pemerintah daerah telah mengadopsi sistem informasi keuangan, efektivitas teknologi tersebut dalam meningkatkan akuntabilitas masih belum banyak dikaji secara komprehensif (Pribadi et al., 2025).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki peran strategis dalam memastikan terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan BPKAD diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelaporan, serta memperkuat fungsi pengawasan sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (Situmorang, 2023).

BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan transformasi digital melalui peralihan sistem dari SIMDA ke SIPD guna mendukung efektivitas pengelolaan keuangan. Namun, fakta empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi informasi dan hasil implementasinya. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain keterlambatan pelaporan, kesalahan input data, keterbatasan validasi informasi, serta hambatan koordinasi antarbidang akibat pembatasan akses sistem.

Selain itu, pengelolaan SIPD yang terpusat menyebabkan penyelesaian kendala teknis harus melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga prosesnya cenderung memerlukan waktu lebih lama. Keterbatasan fitur serta gangguan sistem juga turut memengaruhi efektivitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi teknologi informasi belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya *research gap* antara temuan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa teknologi informasi berdampak positif terhadap akuntabilitas dengan realitas implementasi di lapangan yang masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk menganalisis

sejauh mana teknologi informasi benar-benar berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur mengenai tata kelola keuangan sektor publik serta menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

2. LANDASAN TEORI

Teori Stewardship

Teori stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa individu dalam organisasi cenderung bertindak sebagai steward yang mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks sektor publik, aparatur pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab mengelola sumber daya secara transparan dan akuntabel melalui penyusunan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Pribadi et al., 2025). Teori ini relevan dengan penelitian karena pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan baik, di mana pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi sarana penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan peningkatan akuntabilitas.

Teori Technology Acceptance Model (*TAM*)

Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis (1986) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi manfaat) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan), yang bersama-sama mendorong niat serta perilaku individu dalam menggunakan teknologi. Semakin besar manfaat yang dirasakan dan semakin mudah teknologi dioperasikan, maka semakin tinggi tingkat penerimaannya dalam organisasi. Model ini banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi karena mampu menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi, termasuk dalam penggunaan sistem keuangan daerah seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam penelitian ini, TAM membantu memahami bagaimana persepsi pegawai terhadap teknologi informasi dapat memengaruhi optimalisasi penggunaan sistem serta berdampak pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan seperangkat perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta mekanisme pengolahan data yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan (Laudon & Laudon, 2020). Dalam sektor publik, teknologi informasi berperan sebagai alat strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi sistem seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang kemudian bertransformasi menjadi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem keuangan yang terintegrasi dan terstandar secara nasional sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses administrasi, memperkuat pengawasan berbasis data, serta

mempermudah konsolidasi laporan keuangan antarinstansi sehingga mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan akuntabel (Fahzura & Najamudin, 2022). Keberhasilan implementasinya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh ketersediaan infrastruktur, kualitas sistem, kemudahan akses, serta tingkat pemanfaatan aplikasi oleh pengguna, karena semakin optimal teknologi digunakan maka semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan kualitas informasi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik secara transparan, akurat, dan sesuai dengan peraturan kepada pihak yang berhak, baik secara internal maupun eksternal. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan integritas, kepatuhan, serta komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) (Norcahyani, 2022; Sari, 2025). Dalam praktiknya, akuntabilitas mencakup dimensi finansial dan administratif, didukung oleh hubungan pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah yang lebih tinggi serta horizontal kepada masyarakat sebagai bentuk kontrol publik (Fahzura & Najamudin, 2022; Syachbrani, 2024). Penerapan prinsip transparansi, kepatuhan, ketepatan, efisiensi, dan pertanggungjawaban menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah, karena semakin kuat akuntabilitas yang diterapkan maka semakin tinggi kepercayaan publik serta semakin kecil potensi penyimpangan anggaran (Kristina, 2022; Aldi Rindra, 2025). Oleh karena itu, akuntabilitas berperan sebagai fondasi utama dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hipotesis Penelitian

H1: Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah sampel 117 yang ditentukan dengan menggunakan metode *sampling jenuh* (sensus), karena seluruh anggota populasi dijadikan responden penelitian. Namun, dari 117 kuesioner yang dibagikan, hanya 116 kuesioner yang kembali dan dapat diolah, karena satu pegawai sedang melakukan perjalanan dinas sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pengisian kuesioner.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Objek penelitian ini adalah Objek penelitian ini adalah pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah kuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Teknologi Informasi. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat), serta untuk mengukur seberapa besar hubungan tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Penggunaan regresi linear bertujuan untuk mengetahui arah dan kekuatan pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta menilai apakah hubungan tersebut signifikan sebagai dasar pengujian hipotesis. Analisis ini menggunakan metode regresi linear sederhana yang diolah melalui program IBM SPSS 31 guna memastikan apakah teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	94.548	4.292		22.030	<,001
	Teknologi informasi	.294	.044	.533	6.733	<,001
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan						

***Sumber** : Data yang diolah tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 1 maka dapat diperoleh model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = 94{,}548 + 0.294X + \varepsilon$$

Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,294, yang berarti setiap peningkatan teknologi informasi akan meningkatkan akuntabilitas sebesar 0,294 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

Nilai t hitung 6,733 dengan signifikansi < 0,05 menegaskan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Selain itu, nilai Beta 0,533 menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap akuntabilitas. Dengan demikian, hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Koefisien Determinasi (R2)

Hasil pengujian analisis regresi linier sederhana juga menghasilkan nilai koefisien determinasi R2. Nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Koefisien Determinasi

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.022[a]	.120	.108	3.891
a. Predictors: (Constant), X				

***Sumber** : Data yang diolah tahun 2025*

Berdasarkan tabel 2 besarnya nilai koefisiensi determinasi (R2) dapat dilihat pada kolom R *Square* Berdasarkan hasil regresi linear sederhana, diperoleh nilai R Square 0,120 dan Adjusted R Square 0,108, yang berarti teknologi informasi mampu menjelaskan 10,8% variasi akuntabilitas pengelolaan keuangan, sementara 89,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi informasi memang berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, namun belum menjadi faktor utama karena akuntabilitas juga dipengaruhi oleh aspek lain seperti kualitas sumber daya manusia, regulasi, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, serta kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pembuktian dari hipotesis – hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Uji hipotesis terdiri dari uji T (Parsial)

Tabel 3 Hasil Analisis Uji T

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	94.548	4.292		22.030	<,001
	Teknologi Informasi	.294	.044	.533	6.733	<,001
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan						

***Sumber** : Data yang diolah tahun 2025*

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu teknologi informasi, terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan secara parsial. Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hipotesis penelitian (H1) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Hasil pengujian menggunakan IBM SPSS Statistic 31 menunjukkan nilai t-hitung sebesar 22,030 lebih besar dari t-tabel 1,981 serta nilai signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga H1 diterima. Hal ini membuktikan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini dibuktikan melalui nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dan t-hitung 22,030 > *t-tabel* 1,981, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa teknologi informasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Koefisien regresi yang bernilai positif juga menunjukkan hubungan searah, artinya semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang dihasilkan. Sebaliknya, pemanfaatan

teknologi yang kurang maksimal berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas, terutama dalam aspek ketepatan waktu, keakuratan, dan transparansi informasi keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi terbukti mendukung seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan dan penganggaran, sistem informasi membantu penyusunan program dan alokasi dana secara lebih terstruktur, transparan, dan berbasis data sehingga dapat meminimalkan kesalahan perhitungan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, teknologi memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara real time, sehingga memudahkan proses pengawasan dan menjadikan administrasi keuangan lebih tertib. Pada tahap pelaporan, teknologi mempercepat penyusunan laporan yang akurat dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi informasi berperan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan distribusi jawaban responden, penerapan teknologi informasi di lingkungan instansi tergolong sangat baik. Responden menilai bahwa sistem yang digunakan mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelaporan, serta mempermudah akses informasi keuangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti ketergantungan pada kualitas jaringan, perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta potensi gangguan teknis yang dapat menghambat operasional. Oleh karena itu, meskipun teknologi telah memberikan kontribusi signifikan, penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pengguna tetap diperlukan agar pemanfaatannya lebih optimal dan berkelanjutan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan juga menunjukkan kategori sangat baik. Instansi dinilai telah mampu menyusun laporan secara jelas dan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Laporan tersebut tidak hanya menggambarkan realisasi kegiatan, tetapi juga mencerminkan pencapaian target kinerja. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam menjaga konsistensi kualitas pelaporan, memperkuat pengawasan internal, serta mengoptimalkan pemanfaatan informasi keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Secara umum, praktik ini telah mencerminkan penerapan prinsip good governance seperti transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan tanggung jawab kepada publik.

Temuan penelitian ini selaras dengan **Teori Stewardship**, yang memandang aparatur pemerintah sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. Teknologi informasi berfungsi sebagai alat pendukung bagi aparatur dalam menyediakan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian juga konsisten dengan **Technology Acceptance Model (TAM)**, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Tingginya tingkat penerimaan aparatur terhadap sistem informasi keuangan mendorong pemanfaatan teknologi secara optimal sehingga berdampak pada peningkatan akuntabilitas.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan teknologi dengan proses bisnis, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperkuat komitmen manajerial terhadap tata kelola yang baik. Dengan demikian, teknologi informasi dapat dipandang sebagai salah satu faktor strategis dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meskipun efektivitasnya akan semakin optimal apabila disertai

penguatan aspek non-teknologi seperti budaya organisasi yang transparan dan sistem pengendalian internal yang kuat.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 serta t-hitung lebih besar dari t-tabel, sehingga hipotesis penelitian diterima. Temuan ini menegaskan bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dihasilkan, terutama dalam hal transparansi, ketepatan waktu, dan keakuratan laporan keuangan.

Meskipun demikian, nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa teknologi informasi belum menjadi faktor dominan karena akuntabilitas pengelolaan keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, regulasi, serta budaya organisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan infrastruktur teknologi, kompetensi pegawai, serta dukungan manajerial agar pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan lebih efektif dan mampu memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

DAFTAR PUSTAKA

Adelia, A. P., & Harahap, W. S. M. (2022). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur, komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen, 2(1), 156–167.

Aldi Rindra, M. N. (2025). Implementasi Aplikasi E-Bmd Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Repository IPDN, 1–15.

Algifari. (2025). Peran Teknologi Informasi dalam Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Loli Dondo). 167–186.

Ayem, S., & Amahala, R. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 12(01), 90–102.

Azis, D. I., & Kharisma, A. S. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di. 7, 115–124.

Bussa, R. (2023). Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Enrekang. 0422.

Davis, F. D. (1986). A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results. Doctoral Dissertation. MIT Sloan School of Management.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30.

Donaldson, L. (1991). Stewardship Theory and Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64.

Fahzura, L., & Najamudin, N. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. Journal of Social and Policy Issues, 1, 7–13. https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.33

Fitriah. (2023). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah di Kota Banjarmasin. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(2), 88–100.

Fitriah. (2025). Pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 10(1), 45–58.

Ghinaldi, M. B. N. (2024). Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Badam Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu). 167–186.

Indrajit, R. E. (2018). E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Jakarta: Gramedia.

Intihanah, Mirosea, N., & Rahayu, A. S. (2020). PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari). 5(1), 122–132.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Kristina. (2022). Prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Good Governance, 5(1), 14–26.

Kurniawan, S. B., & Wea, T. (2022). Akuntabilitas dan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Administrasi Publik, 8(3), 110–122.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial.

Lestari, S., & Widodo, A. (2021). Pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas pengawasan internal dan audit. Jurnal Akuntansi Sektor Publik, 6(2), 98–109.

Makayasa, P. A. (2024). Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Pekanbaru. 1–23.

Nabila, P., & Sari, V. F. (2024). Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 6(2), 500–516. https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1481

Norcahyani, F. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Kota Semarang.

Nugrah Leksono Putri Handayani. (2023). Peran Teknologi Informasi Pada Akuntansi Sektor Publik Dalam Pencegahan Fraud. Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis, 1(2), 27–35. https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i2.215

Pribadi, K. I., Santoso, S. E. B., Dirgantari, N., & Hartikasari, A. I. (2025). Pengaruh Komitmen Organisasi, Transparansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Varibel Moderasi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 13(1), 39–52. https://doi.org/10.29103/jak.v13i1.18193

Rahmawati, E. A. (2021). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Value for Money dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Batang.

Rinaldi. (2020). Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan, 6(1), 33–47.

Santoso, S. (2021). Menguasai SPSS untuk Statistik Parametrik. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sari, Y. P. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, dan Transparan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Melalui Partisipasi Masyarakat dengan Relevansi Nilai Syariah di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang. Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Setiawan, Z., Amali, L. N., & Polin, M. (2023). Analisis Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan ISO / IEC 25010 di BAPPEDA Provinsi Gorontalo. 3(1), 142–152.

Situmorang, K. T. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Kota ….

http://eprints.ipdn.ac.id/16187/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/16187/1/REPOSITORY KEVIN TUMBUR SITUMORANG.pdf

Solimun. (2017). Metodologi Statistik Multivariat. Malang: UB Press.

Sriwijayanti, H. (2021). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola Apbd Skpd Dinas Pemerintah Kota Padang). Jurnal Ekobistek, 7(1), 89–101. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v7i1.6

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Ke-2). Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suharyanto. (2020). Pengaruh penggunaan SIMDA terhadap efektivitas laporan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 5(1), 22–35.

Sulistoni. (2003). Akuntabilitas pemerintahan daerah. Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 11–20.

Suryani, & Firmansyah. (2021). SIPD sebagai sistem nasional pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 7(2), 45–60.

Syachbrani, W. (2024). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Bata Ilyas Journal of Accounting, 5(1). https://doi.org/10.37531/bijac.v5i1.6802

Tanaamah, A. R., Wijaya, A. F., & Maylinda, S. A. (2021). Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Sektor Publik: Penyelarasan Teknologi Informasi Dengan Visi Kepemimpinan (Studi Kasus: Kota Salatiga dan Kabupaten Bengkayang). Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, 8(6), 1319. https://doi.org/10.25126/jtiik.2021865379

Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. Digital Business Journal, 1(1), 64. https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947

Wasiatun Hasanah, A. W. A. M. P. K. R. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Jurnal Penelitian Nusantara, 1, 155–162.